

**STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT LA-TANSA GONTOR
PADA UMKM DI KECAMATAN MLARAK**

SKRIPSI



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Prianto. Strategi Pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor Pada Umkm Di Kecamatan Mlarak. *Skripsi*. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Pembimbing: Mansur Azis M.S.I.

Kata kunci: BMT La-Tansa, Pemberdayaan, Nasabah.

Pemberdayaan menjadi hal yang penting dalam upaya mengantisipasi permasalahan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Kesenjangan itu adalah akibat dari kepemilikan sumber daya produksi dan produktivitas yang tidak sama diantara pelaku ekonomi. *Baitul mal wat tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, oleh karena itu peran BMT dalam pemberdayaan UMKM sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor Terhadap Umkm Di Kecamatan Mlarak beserta dampaknya. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah permasalahan modal dan kualitas SDM yang lemah dalam mengelola usaha serta sifat yang *unbankable*. Dibutuhkan peran lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT sebagai salah satu solusi dari permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah survey atau observasi, wawancara dan dokumentasi. dengan responden staf karyawan BMT La-Tansa dan beberapa anggota nasabah yang melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian yaitu peranan pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor belum maksimal, masih termasuk dalam tahap *empowering*, yang seharusnya bisa menjadi tahap *protecting*. Pada *baitul maal* seharusnya juga sudah sampai pada tahap pemberdayaan, tetapi BMT La-Tansa Gontor lebih fokus terhadap *baitul tamwil*. Kurang maksimalnya pemberdayaan ini disebabkan pergantian staf karyawan setiap tahunnya.

Dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor cukup positif bagi masyarakat sekitar khususnya anggota nasabah, mayoritas nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dari BMT La-Tansa Gontor. Seperti meningkatnya jumlah aset dan bertambahnya jumlah UMKM di Kecamatan Mlarak dan sekitarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Prianto	210717166	Ekonomi Syariah	STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT LA-TANSA GONTOR PADA UMKM DI KECAMATAN MLARAK

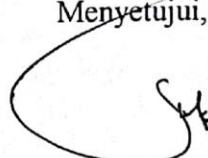
Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 21 September 2021



Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,


Mansur Azis, M.S.I.
NIDN. 2024068601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT LA-TANSA
GONTOR PADA UMKM DI KECAMATAN MLARAK
Nama : Prianto
NIM : 210717166
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

Penguji I :
Ridho Rokamah, M.Si.
NIP. 197412111999032002


Penguji II :
Mansur Azis, M.S.I.
NIDN. 2024068601

()
()
()

Ponorogo, 6 Oktober 2021

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prianto
NIM : 210717166
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT LA-TANSA GONTOR
PADA UMKM DI KECAMATAN MLARAK

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari leseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ponorogo, 10 Oktober 2021

Prianto

NIM. 210717166

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prianto
NIM : 210717166
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT LA-TANSA GONTOR PADA UMKM
DI KECAMATAN MLARAK”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.



Ponorogo, 20 September 2021

Prianto

NIM. 210717166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan Agustus 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Februari 2020 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).²

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta UII Press, 2004), 51.

²Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan. Diakses pada 20 Agustus 2021.

keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.³

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁴

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuhkembangkan bisnis usaha kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁵

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Maal* dan *Bait at Tamwil*. *Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*).

³Euis Amalia, *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 2.

⁴Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT, (Jakarta: PINBUK, 2000), 1.

⁵Materi Ke BMT-an, Sumber. Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES. Diakses pada 20 Agustus 2021.

Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahik*) zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern.⁶

Sedangkan *Bait at- Tamwil* adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.⁷

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menggalakan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Bank Muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ *Baitul Maal Wat Tamwil*). Sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan. Saat dibuka kala itu, BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Jaringan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro, melalui program *linkage*.⁸

⁶Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2011), 199.

⁷H. A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

⁸Supriadi Muslimin, "Raih Dukungan Bank Syariah", [http://www. Seputar-indonesia.com](http://www.Seputar-indonesia.com), Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Linkage program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, risiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sangat diperlukan sebagai mediasi antar sector UMKM dengan pihak bank syariah. Hal ini di karenakan karakteristik BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebagai kepanjangan tangan bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.⁹

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

1. Daya tahan. Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

⁹Showam Azmy, Muhammad, "Bank Syariah: Bank Yang Ramah UMKM", <http://ekisonline.com/index>. Diakses pada tanggal 20Agustus 2021.

2. Padat karya. Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.
3. Keahlian khusus. UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.
4. Jenis produk. Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.
5. Keterkaitan dengan sektor pertanian. UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.¹⁰

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah,

¹⁰Muhammad Iqbal, "Karakteristik UMKM", <http://e-journal.uajy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, seperti mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* juga bisa menitipkan zakat, infak, dan sedekah, seperti menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹¹

Dengan demikian, keberadaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 448.

(*Baitul Maal wat Tamwil*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota) dalam pembiayaan yang diberikan oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil. Pertumbuhan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang cukup pesat dikarenakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim cocok dengan sistem yang diterapkan oleh *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), dengan itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan sejahtera.

Sebagai contoh, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik.

Penelitian Hestanto tentang pengaruh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada

diantaranya yang terperangkap oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya dengan para pelepas uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman dari rentenir, maka BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan *qardul hasan* yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.¹²

Uraian di atas dapat kita lihat bahwasanya peran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat *urgent*. Dikarenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, mampu menggerakkan dan menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga.

Demikian juga yang dilakukan oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) La-Tansa Gontor. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) La-Tansa Gontor merupakan lembaga keuangan mikro syariah di bawah binaan PMDG (Pondok

¹²Hestanto, "Baitul Mal Wattamwil dan BBPR", <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tamwil/> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Modern Darusalam Gontor). Dengan berdirinya BMT La-Tansa Gontor diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil (*grass root*) khususnya dan masyarakat luas umumnya. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) La-Tansa Gontor melakukan kegiatan usaha di Jl. Raya Jabung-Mlarak, dengan pangsa pasar adalah masyarakat sekitar khususnya serta masyarakat Ponorogo pada umumnya. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) La-Tansa Gontor memberikan argumentasinya bahwa tahun demi tahun jumlah kelahiran penduduk di Ponorogo semakin bertambah dan semakin sempitnya lowongan kerja yang memadai sehingga banyaknya kemiskinan maupun pengangguran yang terjadi di wilayah Ponorogo, oleh karena itu BMT La-Tansa Gontor yang bergerak di bidang pendistribusian memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha mikro kecil menengah untuk menggerakkan di sektor ekonomi.¹³

Program BMT La-Tansa Gontor diantaranya adalah:

1. Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama pengusaha kecil.
2. Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Seperti yang disampaikan oleh pihak manajer BMT La-Tansa Gontor, Hanif Amrullah mengatakan:

“awal berdirinya BMT ini didasari pada harapan kami yang dapat menekan adanya praktik rentenir (pinjaman berbunga besar) yang terjadi di wilayah Kecamatan Mlarak dan sekitarnya, diiringi dengan program kami membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Kecamatan Mlarak dan sekitarnya, namun pada kenyataannya setelah hampir 12 tahun berdiri, ternyata

¹³Beni, Sekretaris BMT La-Tansa Gontor, *Wawancara* pada tanggal 28 Agustus 2021.

kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar”.¹⁴

Menurut pihak BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), masyarakat sekitar kurang informasi atau pengetahuan tentang banyaknya keunggulan melakukan pembiayaan di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang tentunya bebas riba, hal ini mungkin terjadi karena masyarakatnya yang masih belum berani mengambil risiko untuk terjun ke dunia usaha atau bisnis, yang memang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani atau karyawan swasta. Dalam hal pemberdayaan pihak BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) hanya memberikan bentuk pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha kepada anggota atau nasabahnya saja, belum sampai ke masyarakat luas pada umumnya.

Seperti juga yang dikatakan oleh salah satu pelaku usaha penjual sembako, Rohman mengatakan “sebagai pelaku usaha bisnis tentunya banyak menghadapi masalah-masalah dalam operasionalnya, namun yang paling fatal adalah modal awal, seberapa kuat ketahanan modal awal itu sendiri dalam praktiknya akan sangat berpengaruh dalam kedepannya”.¹⁵ Disini terlihat bahwa masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah dalam pengadaan modal awal untuk berwirausaha atau berbisnis. Sebagian dari mereka mengaku takut untuk melakukan pembiayaan dikarenakan kurang ilmu pengetahuan dalam berbisnis yang berdampak kerugian dalam praktiknya. Dari pihak pelaku UMKM berharap dengan adanya pemberdayaan seperti pelatihan gratis, dan juga penyuluhan terhadap warga masyarakat yang kurang

¹⁴Hanif Amrullah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Agustus 2021.

¹⁵Rohman, *Wawancara*, pada tanggal 28 Agustus 2021.

cakap terhadap dunia wirausaha, agar nantinya masyarakat dapat bergabung dalam menciptakan kehidupan berekonomi yang merata.

Anggota yang diberikan pembiayaan seharusnya dapat meningkatkan usahanya, namun masih ada anggota yang tidak mengalami peningkatan usaha yang dapat dilihat dari pendapatan yang menurun. Adanya kesenjangan antara tujuan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dengan keadaan yang terjadi dan terdapat juga kesenjangan yang terjadi antara pemerintah yang kurang memperhatikan UMKM, sehingga menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melihat pentingnya kehadiran UMKM dalam penunjang ekonomi masyarakat kelas bawah yang masih butuh bimbingan dari pihak-pihak pendukung seperti lembaga-lembaga keuangan maupun pemerintah.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) La-Tansa Gontor yang berdiri sejak 2009, di wilayah yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh, petani dan juga karyawan swasta. Oleh sebab itu dengan hadirnya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) La-Tansa Gontor diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat mendirikan sebuah usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Alasan selanjutnya adalah lokasi penelitian ini dekat dengan domisili peneliti, sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji, dan juga dengan dekatnya jarak tersebut dapat meningkatkan intensitas penelitian sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih maksimal.

Dari paparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI PEMBERDAYAAN BMT LA-TANSA GONTOR PADA UMKM DI KECAMATAN MLARAK“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut , maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan BMT La-Tansa Gontor terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah ?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan yang dilakukan BMT La-Tansa Gontor terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan BMT La-Tansa Gontor terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan yang dilakukan BMT La-Tansa Gontor terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi pihak BMT La-Tansa Gontor.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

c. Bagi peneliti

- 1) Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang peran BMT terhadap UMKM.
- 2) Untuk menambah bahan pertimbangan antar teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori pemberdayaan, BMT, UMKM dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis peran BMT La-Tansa Gontor dalam pemberdayaan UMKM.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata “berdaya” yang berarti adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak¹. Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya manusia dengan memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan berupaya mengembangkannya². Sedangkan menurut Imang Kiansur Burhan, mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi³. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan disini adalah upaya yang dilakukan BMT La-Tansa dalam membangkitkan kesadaran atau memotivasi masyarakat khususnya masyarakat yang dalam keseharian agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta membantu masyarakat untuk menginvestasikan sebagian pendapatan mereka dengan aman tanpa adanya riba.

Ismawan berpendapat bahwa pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 20 Agustus 2021.

²Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta:PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 145.

³ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung:PT. Rosda Karya, 2001), 42.

memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber daya yang penting. Tentu saja sebuah usaha yang pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan toleran terhadap sesamanya, dengan menyadari potensi yang dimilikinya.⁴

a. Bentuk Pemberdayaan

Salah satu bentuk pemberdayaan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁵ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat⁶. Pola pemberdayaan ekonomi masyarakat ini mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.
- 3) Aktivitas yang dilakukan terencana, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.

⁴Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, (Jakarta:Gramedia, 2001), 55.

⁵Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), 54.

⁶Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 200.

- 4) Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
- 5) Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.
- 6) Ada keharusan membantu lapisan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah. Jika tidak, maka solidaritas dan kerjasama sulit tercapai.

b. Upaya Pemberdayaan

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:⁷

- 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai

⁷Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2012), 96.

masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

- 3) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan akses bisnis, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

- 4) Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaiki pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 6) Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

d. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najiati, ada empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Prinsip Kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan

⁸Najiati, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International, 2005), 54.

dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

- 2) Partisipasi program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- 3) Keswadayaan atau kemandirian Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

- 4) Berkelanjutan Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

e. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan masyarakat menurut Harry Hikmat, terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut⁹:

- 1) Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- 2) Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

⁹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), 79.

- 3) Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

f. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tahap persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

¹⁰ Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 63.

- 4) Tahap pemformalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- 5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- 6) Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- 7) Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2. *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balai usaha terpadu. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara etimologi *Baitul Maal* berarti rumah uang, sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah pembiayaan.¹¹

MA Mannan menyebut kan bahwa *Baitul Maal* berasal dari dua kata yakni, *Bait* yang berarti rumah, dan *Maal* yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan kata-katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Menurut Mannan, banyak ahli berbeda pendapat tentang fungsi dari *Bait al Maal* serta siapa yang pertama kali mendirikannya. *Baitul maal* berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*.¹²

Sedangkan *Bait at Tamwil* adalah lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuntungan (*Profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kepada

¹¹Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), *Pendidikan dan Pelatihan Baitul maal wat Tamwil*, Diakses pada 20 Agustus 2021.

¹²MA Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan*, terjemahan Drs. M. Nastangin, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1993), 179.

anggota dengan imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai ketentuan syariah.¹³

Beberapa latar belakang pembentukan dan cirri BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat dianggap tidak *bankable*, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal.
- b. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
- c. Berbadan hukum koperasi.
- d. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
- e. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.¹⁴

Dalam menjalankan usahanya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) menggunakan tiga prinsip:

- a. Prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dengan nasabah.
- b. Sistem jual beli. Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut

¹³Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, *Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*, (Jakarta: MES, tanpa tahun), 199.

¹⁴Ibid, 201.

dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- c. Sistem *non-profit*. Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau *qardhul hasan*. Dengan sistem ini nasabah hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja.¹⁵

a. Fungsi dan Peran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat dijabarkan sebagai berikut.¹⁶

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- 2) Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- 4) Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- 5) Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 101.

¹⁶Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), “Pedoman Cara Membentuk Masyarakat Berbasis Ekonomi Syariah”, Diakses pada 20 Agustus 2021.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedeqah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.¹⁷ *Pertama*, fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota. *Kedua*, fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Tidak hanya bertindak sebagai lembaga *profit* tapi juga sebagai lembaga *nonprofit*. Dana sosial BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) biasa didapatkan dari lembaga seperti, dompet dhuafa, atau dana zakat, infak, sedeqah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) tersebut. *Ketiga*, fungsi sebagai penggerak sektor riil. Penyaluran dana kepada sektor riil merupakan sebuah keunggulan dari (*Baitul Maal wat Tamwil*) BMT. Penyaluran kepada sektor riil akan berdampak luas dan *continue* dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sektor riil biasa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk

¹⁷Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), 81-84.

mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dimasyarakat adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh

¹⁸Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379.

karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Kendala yang dihadapi oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dalam pengembangan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah:

- 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- 2) Meskipun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang seperti rentenir, yang artinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- 3) Beberapa BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada

satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.

- 4) BMT cenderung menghadap BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau *partner* dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).
- 5) BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) lebih mementingkan menjadi *baitul tamwil* dari pada *baitul maal*. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.¹⁹

b. Badan Hukum BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Badan hukum BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) biasa didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.²⁰ Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi daari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai

¹⁹Ibid, 397.

²⁰Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha Kami, 1996), 216.

Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).²¹

Selain dengan badan hukum KSM, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²²

Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat biasa mendirikan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum, keberadaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD (Koperasi Unit Desa).

c. Landasan, Asas, dan Tujuan BMT

Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dijelaskan bahwa landasan umum kelembagaan koperasi adalah

²¹H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

²²Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 243.

Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama.

Secara ideologis, keberadaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) tercermin pada aspek dan ketuhanan.²³

Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pada perkembangan selanjutnya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) , memiliki total

²³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 252.

aset tidak lebih dari Rp.600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.²⁴

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.²⁵

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

²⁴Ikhsan Maulana, "Lembaga Keuangan Mikro Syariah" <http://www.forumzakat.net/index.php>. Diakses pada tanggal 20 17 Februari 2021.

²⁵Badan Pusat Statistik Indonesia. "Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008. No. 28/05/Th XI", diakses 20 Februari 2021.

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.²⁶

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian (agribisnis).

Kriteria Usaha menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

²⁶Supriadi Muslimin, “Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://nayasemangat.blogspot.com/2002/10>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

a. Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Khusus untuk peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Pengembangan berbagai skim Perkreditan untuk UMKM

- b) Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional.
- c) Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah.
- d) Program skim pendanaan komoditas UMKM melalui Resi Gudang.
- e) Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
- f) Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank.
- g) Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang.
- h) Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan.
- i) Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).²⁷

Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UMKM karena berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMKM sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan UMKM tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut antara lain sejumlah peraturan terkait

²⁷ Ibid, 241.

pengembangan UMKM dari pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih populer disebut *Baitul maal wa at Tamwil* (BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa at Tamwil* (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.

Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang cukup strategis dalam meningkatkan peremberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.

Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan BMT dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dalam rangka mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Perlu kerja keras dari semua pihak terkait untuk terus memajukan (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) LKMS terutama BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), jangan sampai kelemahan-kelemahan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang diantaranya (1) Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan *mudharib* yang mempunyai pendapatan kecil. (2) Margin yang telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada *mudharib*. (3) Dalam penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa, semuanya

terulang lagi atau mungkin bahkan marak terjadi pada pola kinerja operasional BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).²⁸

a. Masalah Yang Dihadapi UMKM

Menurut Tulus Tambunan, perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan *input* lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.²⁹

Dengan demikian, dibutuhkan berbagai macam bentuk kebijakan dan langkahlangkah untuk pengembangan UMKM yang sesuai dengan

²⁸Sayful Hasbi Siregar, "Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>. Diunduh pada tanggal 23 Februari 2021.

²⁹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 51.

permasalahan tersebut, agar UMKM di negara Indonesia dapat berkembang dan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan persoalan diatas maka penelti menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini, penelitian menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Pertama, penelitian oleh Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang”, dalam jurnal *Modernisasi* Volume 5, Nomor 3, Oktober 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSP/USP mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, sedangkan satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan. KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan, proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam perkembangan KSP/USP adalah rendahnya kemampuan SDM, lemahnya tata kelola, dan belum optimalnya pembinaan dari pemerintah.³⁰

Kedua, pada penelitian yang dilakukan Ni Nyoman Sunariani, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui

³⁰Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang”, *Jurnal Modernisasi*, 3, (Oktober 2016), 11.

Program Binaan Di Provinsi Bali” dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Volume 2 No 1 Tahun 2017. Hasil penelitian diperoleh premis program binaan UMKM dan Analytical Hierarchy process yang memberikan hasil maksimal untuk pemberdayaan secara ekonomi UMKM di Provinsi Bali. Dengan pemberdayaan tersebut akan memberikan peningkatan secara signifikan pertumbuhan ekonomi pasar domestik dan Internasional Provinsi Bali. Kendala yang dihadapi UMKM ditingkat hulu yaitu modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku, dan pemasaran. Sedangkan kendala di hilir ditemukan adanya kurangnya dukungan dari Pemerintah dalam proses pemasaran dan alokasi sarana pameran produk UMKM di Pulau Bali, tingkat nasional, dan Internasional yang diperoleh dari analisis identifikasi masalah UMKM.³¹

Ketiga, penelitian oleh Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mitra, Kecil, dan Menengah”, dalam *jurnal Ahkam*, Vol XIII No.2, Juli 2018. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (collateral minded) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa besarnya pembiayaan syariah untuk sektor-sektor ekonomi dan UMKM oleh perbankan syariah di Kota Makassar selama

³¹Ni Nyoman Sunariani, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 1, (2017), 9.

tahun 2010- September 2011 memperlihatkan bahwa selama tahun 2010 (Januari-Desember) besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk sektor-sektor ekonomi dan UMKM di Kota Makassar berfluktuasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM di Kota Makassar belum optimal.³²

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh saudari Aguanita dalam skripsinya FT-UIN Malang, tahun 2019 dengan judul skripsi “Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa’adah Malang”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan konsep pemberdayaan pengusaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah pemberdayaan BMT Assa’adah Malang adalah mengembang investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM serta menjadi penghubung antar UKM dengan Bank. BMT juga mengembangkan bisnis yang bertujuan untuk membantu UKM dengan memberikan pembiayaan karena BMT sendiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro syariah dengan Modal Kecil.³³

Persamaan dengan penelitian sekarang ini adalah pada usaha BMT dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel penelitian terdahulu yang hanya fokus pada UMKM dan BMT menjadi

³²Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mitra, Kecil, dan Menengah”, *Jurnal Ahkam*, 2 (Juli 2018), 15.

³³Aguanita, “Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa’adah Malang”, *Skripsi* (FT-UIN Malang, 2017), 46.

penghubung UKM dengan Bank, pada penelitian sekarang ini membahas bagaimana peran BMT dalam memberdayakan UMKM fokusnya pengusaha kecil dan juga ingin mengetahui apa saja dampak yang diberikan.

Kelima, penelitian oleh Indah Andayani, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19” dalam *Jurnal Pendidikan Nonformal* Volume 16, No. 1, Maret 2021. Hasilnya Program pemberdayaan digital marketing menjadi pilihan strategi pemberdayaan pemasaran produk UMKM untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Pemberdayaan digital marketing memberikan kesempatan pelaku UMKM dalam memulai usaha dengan sistem Online pada aplikasi perdagangan seperti *Go-Food*, *Grab Food*, *Shopee*, *Lazada*, atau memanfaatkan pasar media sosial facebook, instagram dan twitter. Perlunya pendampingan secara berkala guna mengevaluasi pelaksanaan pemasaran digital oleh pelaku UMKM hingga masa pandemi Covid-19 berakhir. Pendampingan dapat berupa bagaimana membuat iklan yang menarik atau bagaimana melakukan promosi pada pasar media sosial.³⁴

³⁴Indah Andayani, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 1 (Maret 2021), 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di suatu masyarakat. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistik* apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden.¹

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa tempat/lokasi yang nyata maka, data tidak akan dapat diperoleh oleh penulis. Oleh karena itu sesuai dengan judul, penulis menjadikan BMT La-Tansa Gontor serta wilayah disekitarnya sebagai tempat menggali data. BMT ini berlokasi di Jl. Raya Jabung-Mlarak, Gontor, Mlarak, Ponorogo.

C. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan Peran *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) La-Tansa Gontor dalam pemberdayaan UMKM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini berupa informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti yang terlibat langsung dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.² Orang-orang tersebut adalah karyawan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) La-Tansa Gontor dan beberapa nasabah atau mitra yang melakukan pembiayaan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) La-Tansa Gontor..

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara mengambil, mencatat, memfoto tentang kegiatan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) La-Tansa Gontor, mengamati data yang telah tersedia melalui publikasi atau pihak lain misalnya berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai

²Ibid, 8.

landasan teori atau dasar penunjang untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³ Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu bagaimana peran BMT La-Tansa Gontor dalam pemberdayaan UMKM.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang di angkat oleh peneliti.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi bagaimana peran BMT La-Tansa Gontor dalam pemberdayaan UMKM.

³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

⁴Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 73.

3) Dokumentasi

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data misalnya profil perusahaan, letak perusahaan dan data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Dokumentasi yang diperoleh berupa foto dari narasumber dan narasumber pendukung.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas (kepercayaan) atau keabsahan suatu data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber untuk pengecekan keabsahan data.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari wawancara dengan karyawan BMT La-Tansa Gontor serta beberapa mitra atau nasabahnya.

F. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Pada tahap ini kita melakukan proses pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informasi, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip wawancara, adalah proses penghalusan. Dalam hal ini penulis

memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak beberapa literatur buku sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini kita menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapatkan tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggolongkan data berdasarkan rumusan masalah.

3. Memberi Kode

Untuk tahap ini kita melakukan pencatatan judul singkat, serta memeriksa catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan, tujuannya agar memudahkan kita menemukannya makna tertentu dari setiap tumpukan data serta memudahkannya di dalam *outline* laporan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat

⁵Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), 238.

dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil dan gambaran umum (*Baitul Maal Wat Tamwil*) BMT La-Tansa Gontor, Mlarak, Ponorogo.¹

1. Sejarah Berdirinya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) La-Tansa Gontor

Lahirnya bank syariah yang kemudian merubah sistem perbankan Indonesia menjadi *dual banking system* dan dianggap sebagai bank alternatif, belum dapat dipastikan bisa menyentuh umat yang justru sebagian besar berada di lapisan bawah, karena sifat perbankan yang pada umumnya tidak membuka akses pendanaan bagi mereka yang secara tradisional digolongkan sebagai “*unbankable*”. Kondisi ini memberikan inspirasi bagi sejumlah kalangan untuk menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dengan prinsip bagi hasil, yang di kemudian hari dikenal dengan nama *Baitul Maal Wat Tamwil* (disingkat BMT).

Dibalik berbagai kelemahan yang ada, BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) setidaknya telah ikut berpartisipasi di dalam menguatkan usaha-usaha mikro, bahkan menjadi penyangga yang sangat berarti di masa krisis bagi ratusan ribu bahkan mungkin jutaan keluarga berpenghasilan rendah sehingga tidak jatuh miskin atau menjadi sangat miskin. Keberhasilan ini cukup menjadi indikasi bahwa BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sesungguhnya menyimpan potensi yang sangat besar untuk berperan aktif

¹ Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

atau berkontribusi banyak dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi rakyat.

Berdirinya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) La-Tansa Gontor ini didasari pada harapan pimpinan pondok yang melihat banyaknya praktik rentenir (pinjaman berbunga besar) yang terjadi di wilayah sekitar, diiringi dengan program BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yang membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena hal itulah maka munculah inisiatif dari para pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor bersama dengan para ustadz senior pada 10 Mei 2009 BMT La-tansa Gontor berhasil didirikan. Berlokasi di Jl. Raya Jabung-Mlarak, Gontor, Mlarak, Ponorogo. BMT La-tansa Gontor dalam melakukan pelayanan juga mendirikan kantor cabang di Jl. Raya Siman yang fungsinya hanya fokus untuk akses pembayaran angsuran nasabah.

2. Visi dan Misi BMT La-Tansa Gontor

a. Visi

BMT La-Tansa Pondok Modern Darussalam Gontor bervisi menjadi:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Serta sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui komunikasi spiritual dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.²

3. Tujuan dan Landasan Kerja

a. Tujuan

untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat penuh keselamatan, perdamaian dan kemakmuran.

b. Landasan Kerja

- 1) BMTLa Tansa Gontor menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.

² Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

- 2) BMT La Tansa Gontor menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3) BMT La Tansa Gontor adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*.
- 4) BMT La Tansa Gontor wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- 5) BMT La Tansa Gontor berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini BMT La Tansa Gontor bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.³

4. Divisi Operasional

BMT La-Tansa Gontor memiliki dua divisi yaitu;

a. Divisi *Baitul Maal*, dengan kegiatan meliputi;

- 1) Penghimpunan zakat *maal*.
- 2) Penghimpunan *shadaqah* dan *infaq*.
- 3) Penyaluran zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.

b. Divisi *Baitut Tamwil*, dengan produk meliputi;

- 1) Produk Pendanaan (Funding)

³ Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

- a) Barakah (Tabungan Umum) Simpanan Umum untuk berbagai perencanaan hidup anda. Dengan akad wadiah, simpanan Barakah memungkinkan untuk menyimpan ataupun menarik dana kapanpun anda inginkan.
- b) Mahir (tabungan siswa) simpanan umum untuk para pelajar. Dengan akad wadiah, simpanan mahir melatih pelajar untuk menabung, hidup hemat, dan mengatur keuangan sendiri.
- c) Mabruur (tabungan haji dan umroh) simpanan yang didesain bagi anda yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umroh ke *baitullah*. Dengan menabung, anda termotivasi untuk mempersiapkan diri dan membulatkan tekad secara utuh untuk haji dan umroh.
- 2) Produk pembiayaan (Financing)
- a) *Qordul Hasan* adalah akad yang dilakukan antara BMT La-Tansa dan nasabah, dimana pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan *asnaf zakat/infaq/sadaqah* dan ingin berusaha kecil-kecilan.
- b) Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara BMT La-Tansa dan mudharib dimana seluruh modal usaha disediakan oleh BMT La-Tansa dan proporsi/nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha yang disepakati diawal (tertera pada akad).
- c) Murabahah adalah akad jual beli barang antara BMT La Tansa (selaku penjual) dan anggota (selaku pembeli) dimana BMT La-

Tansa menetapkan keuntungan yang dikehendaki. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang telah jelas, jenis jumlah dan harganya. Barang dapat berupa pupuk, bibit, alat-alat pertanian, ataupun barang-barang lainnya untuk tujuan produktif.

- d) Musawamah adalah akad jual beli barang antara BMT La Tansa (selaku penjual) dan anggota (selaku pembeli) dimana harga komoditas yang akan diperjual belikan ditentukan melalui tawar-menawar antara BMT La Tansa (penjual) dan anggota (pembeli) tanpa mengacu pada harga yang dibayarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh penjual.
- e) Penyaluran dana (zakat, infaq dan shadaqah) sebagai:
- (1) Beasiswa UNIDA Gontor.
 - (2) Beasiswa santri berprestasi.
 - (3) Masyarakat sekitar.⁴

5. Struktur Organisasi BMT La-Tansa Gontor

Pelindung Dan Pengawas		Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor
Direktur		Dr. H. Y. Suyoto Arief, M.S.I
Manajer		Hanif Amrullah
Accounting		Ifandi Suhendi
Pembiayaan		Muhammad Naufal Ash Shodiqi
Teller		Fachri Rachmat Thoriq
Marketing		Prameidia Kurniawan
Administrasi		Salman Alfarisy

⁴ Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

B. Paparan Data

1. Proses Pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor Terhadap UMKM

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya diantaranya; *Enabling, Empowering, Protecting*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanif Amrullah selaku manajer, pada tanggal 11 September 2021 tentang bagaimana peran BMT La-Tansa Gontor dalam upaya memberdayakan nasabahnya. Berikut yang beliau sampaikan:

“dalam hal memicu masyarakat untuk menyadari kalo mereka mempunyai potensi untuk berkembang, kami pihak BMT telah melakukan penyuluhan terhadap mitra kami, seperti menawarkan modal untuk usaha dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dengan persentase pembagian keuntungan sesuai yang tertera pada akad. Selain itu pihak BMT juga melakukan pendampingan dalam pembukuan keuangan, agar operasional bisnis mereka berjalan efisien, dengan hal ini kami berharap masyarakat sadar bahwa hal ini merupakan peluang untuk masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang mandiri dan tercukupi ekonominya⁵.”

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa BMT La-Tansa sudah melakukan tindakan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Menanggapi hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan mitra dari BMT La-Tansa yaitu Nurhadi yang mengaku mendapatkan modal dari BMT untuk tambahan modal bisnis lasnya, beliau mengatakan:

“saya memang mengambil pembiayaan dari BMT La-Tansa untuk usaha yang sedang saya tekuni, kemudian dengan tambahan modal itu saya gunakan untuk menambah perlengkapan alat pengelasan saya, seperti untuk membeli tabung las listrik dan pipa-pipa besi. Hal ini

⁵ Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

cukup meningkatkan hasil pendapatan saya, selanjutnya kalau dalam hal pendampingan usaha pihak BMT juga melakukan penyuluhan dan pembinaan/bimbingan terhadap bisnis saya seperti pembukuan operasional keuangan.⁶”

Dari pernyataan kedua narasumber di atas menunjukkan pihak BMT sudah menjalankan perannya dalam upaya pemberdayaan tahap *enabling* (menumbuhkan minat masyarakat). Dengan hadirnya BMT ini memang sudah menjadi bentuk kepedulian lembaga keuangan syariah terhadap keadaan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga untuk selanjutnya tinggal masyarakat sendiri yang harus sadar akan keberadaan dan fungsi BMT tersebut.

Tahap pemberdayaan yang kedua yaitu *empowering* (memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat). Pernyataan dari Muhammad Naufal ketua urusan pencairan pembiayaan sebagai berikut:

“kami dari pihak BMT sudah mengeluarkan anggaran maksimal untuk pembiayaan adalah 50 Juta setiap nasabah, dan selama tahun 2020-2021 anggaran untuk pembiayaan sudah mencapai 500 juta, kami merasa antusias masyarakat semakin tahun mengalami peningkatan dari awal kami berdiri, kecuali mulai tahun 2020 hingga sekarang jumlah anggota nasabah BMT mengalami penurunan, ini terjadi karena dampak adanya pandemi Covid-19 ini. Selama pandemi ini banyak nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kredit, terutama mereka yang mengambil pembiayaan untuk modal usaha di bidang yang membutuhkan kehadiran orang banyak, seperti persewaan terop, dekorasi pernikahan, dan persewaan *sound system* yang dialami beberapa nasabah kami.⁷”

Prameidia Kurniawan selaku ketua marketing, beliau menjelaskan bahwa dengan keberadaan BMT, yang berperan sebagai pendorong

⁶Nurhadi, *Wawancara*, 12 September 2021.

⁷Muhammad Naufal, *Wawancara*, 26 September 2021.

ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah cukup kuat dalam meningkatkan kapasitas potensi masyarakat. Seperti yang dikatakan dalam wawancara berikut:

“selama kami beroperasi memang hal ini yang kami prioritaskan yaitu menumbuhkan atau membangun potensi masyarakat terutama kelas bawah untuk mandiri secara *financial* dalam artian tidak selalu bergantung pada pemerintah, dalam prakteknya kami melakukan pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan pihak-pihak pelaku bisnis yang sudah berkembang selama ini, seperti pada bulan Januari lalu kami mengadakan pelatihan terhadap para mitra kami yang masih dalam tahap pemula untuk bisnis.⁸”

Berdasarkan pernyataan diatas artinya pihak BMT telah melakukan upaya pemberdayaan tahap kedua ini, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap mitra BMT La-Tansa yaitu Wahyudi dengan hasil sebagai berikut: “kalau berbicara tentang peran BMT La-Tansa Gontor untuk masyarakat yang jelas yang saya tahu pihak BMT melakukan pelatihan terhadap para pebisnis yang baru memulai merintis usahanya. Pihak BMT melakukan ini hanya untuk para calon mitra yang benar-benar melakukan pembiayaan di BMT. Selanjutnya yang kami lakukan yaitu mengikuti arahan dari pihak BMT.⁹”

Melihat pernyataan diatas ini berarti dalam hal ini pihak BMT hanya fokus pada para mitra yang baru awal melakukan pembiayaan. Walaupun sebenarnya ada para anggota mitra yang sudah lama bergabung namun kurang cakap dalam menjalankan bisnisnya karena hanya mendapat edukasi dan pelatihan di awal bergabungnya dengan BMT. Seperti yang

⁸Prameidia Kurniawan, *Wawancara*, 11 September 2021.

⁹Wahyudi, *Wawancara*, 12 September 2021.

dikatakan Suyanto berikut: “usaha saya dalam menjalankan bisnis sembako ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun, namun selama saya bergabung di BMT La-Tansa hanya satu kali saja mendapatkan pelatihan yaitu diawal saya bergabung dengan BMT, kemudian setelah itu saya menjalankan bisnis saya hanya sesuai kondisi ekonomi masyarakat lainnya saja tanpa strategi yang jelas.¹⁰”

Melihat kondisi di atas berarti BMT La-Tansa Gontor memang sudah menjalankan tugasnya dalam pemberdayaan, akan tetapi dengan berjalannya waktu, terlihat bahwa peran tersebut kurang maksimal dikarenakan staf karyawan BMT La-Tansa Gontor yang berganti setiap tahunnya, seperti yang dikatan manajernya Hanif Amrullah:

“staf karyawan di BMT ini berasal dari para alumni pondok Gontor yang pada masa kerjanya mereka juga berprofesi sebagai tenaga pengajar di pondok dan juga sebagai mahasiswa UNIDA, jadi apabila para nasabah merasa kurang maksimal dalam bimbingan kami itu sangat wajar, kami dari pihak BMT juga menyadari bahwa hal ini menjadi salah satu kelemahan kami. Ini juga menjadi alasan kami mengapa tidak melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang prospek adanya BMT ini, yang akhirnya membuat kebijakan pembatasan wilayah kerja kami.¹¹”

Selanjutnya pemberdayaan tahap *protecting* (perlindungan). Pernyataan dari Hanif Amrullah selaku manager di BMT La-Tansa Gontor beliau menjelaskan bahwa belum ada program secara jelas untuk melindungi para pelaku UMKM yang bermitra dengan BMT La-Tansa

¹⁰Suyanto, *Wawancara*, 12 September 2021.

¹¹Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

Gontor. Pihak BMT lebih fokus pada pendanaan atau permodalan. Seperti yang dikatakan dalam wawancara berikut:

“untuk tahap perlindungan terhadap mitra, kami memang belum ada program yang jelas, mungkin untuk mengantisipasi apabila ada mitra yang mengalami kendala dalam pembayaran cicilan, kami hanya menghimbau untuk lebih baik lagi dalam mengelola bisnisnya, alasan kami belum melakukan hal ini dikarenakan staf karyawan kami yang setiap tahunnya berganti, sehingga menyebabkan kurangnya informasi mengenai anggota mitra kami dalam kegiatan bisnisnya¹².”

Tentunya hal ini cukup membuat para mitra BMT La-Tansa Gontor merasa kurang puas terhadap pelayanan BMT, seperti yang dikatakan oleh Harsono berikut:

“beberapa bulan lalu ada teman mitra saya yang mengalami pembayaran macet, dan berakibat disitanya aset bisnisnya. Hal ini terjadi karena bisnis sewa terop dan persewaan *soundsystem* yang dia miliki mengalami masalah dikarenakan sepi pelanggan karena covid-19 ini. Tentunya hal tersebut membuatnya kesulitan dalam membayar cicilan pembiayaan. Hal ini juga membuat para calon mitra juga harus berpikir dua kali jika ingin mengambil pembiayaan dari BMT dikondisi masa pandemi, karena risiko disetiap bisnis pasti ada, terlebih jika bisnis tersebut melibatkan kerumunan orang banyak, jika dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini pasti akan kesulitan untuk bertahan.¹³”

Sesuai paparan diatas itu berarti BMT La-Tansa Gontor termasuk dalam kategori tahap *empowering*, karena dalam penerapan pemberdayaan anggota, BMT La-Tansa Gontor belum maksimal, BMT La-Tansa Gontor hanya fokus pada tahap pemberian pembiayaan saja. Jika terjadi pembiayaan macet maka pihak BMT hanya memberikan solusi yaitu

¹²Ibid.,

¹³Harsono, *Wawancara*, 12 September 2021.

memotivasi anggota untuk lebih baik dalam mengelola keuangan dan BMT memberikan tenggang waktu untuk melunasi sesuai kesepakatan bersama..

2. Dampak Pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor Terhadap UMKM

1. Dampak pemberdayaan menurut BMT La-Tansa Gontor

Manager BMT La-Tansa Gontor, Hanif Amrullah mengungkapkan bahwa BMT merupakan salah satu alternatif bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan modal, karena sifat BMT yang tidak sama dengan lembaga keuangan besar seperti bank yang aksesnya sangat susah bagi pengusaha-pengusaha kecil.

“Hal ini dikarenakan BMT mampu menjangkau masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah yang memang pengetahuan mengenai bank masih sangat awam, dapat dikatakan tidak memiliki akses pembiayaan oleh perbankan (*unbankable*). Dengan kemudahan yang dianut oleh BMT menjadi nilai tambah tersendiri, yang secara langsung menarik perhatian masyarakat sekitar khususnya para pedagang-pedagang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.¹⁴”

Selain itu, BMT juga mempunyai tujuan yang penting dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang masih dalam hal sumber modal, terutama yang mempunyai kebiasaan menggunakan jasa rentenir dalam mencari bantuan dana. Hal itulah yang menjadi tujuan utama BMT La-Tansa dalam menjalankan fungsinya.

“Hal yang melatar belakangi BMT La-Tansa dalam menyalurkan pembiayaan untuk usaha/UMKM bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat sekitar yang masih menggunakan jasa rentenir (lintah darat) untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya untuk para pedagang-pedagang yang berada di pasar.

¹⁴ Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

Peminjaman modal yang diberikan rentenir tentu saja sangat membebani pedagang, dengan tingkat bunga yang tinggi tentu sudah sangat membebani pedagang. Maka dari itu BMT sebagai lembaga keuangan syariah memberikan solusi untuk masyarakat sekitar agar mendapatkan dana cepat, tanpa harus dibebani dengan riba (bunga) yang mencekik.^{15,}

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa peran yang dijalankan BMT La-Tansa dalam permasalahan modal bukan hanya untuk akses modal, melainkan juga untuk menekan praktik rentenir di kalangan masyarakat dalam mencari tambahan modal, yang mana praktik tersebut sangat membebani masyarakat terutama pedagang-pedagang kecil karena menggunakan sistem bunga.

Hanif Amrullah juga menuturkan bahwa selain memberikan bantuan modal berupa pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang tergolong pelaku UMKM atau pedagang-pedagang kecil, BMT La-Tansa juga melakukan monitoring terhadap usaha-usaha nasabah apakah berkembang atau tidak. Seperti kata beliau: “pembiayaan usaha yang dilakukan BMT La-Tansa dengan cara memonitoring perkembangan usaha setiap nasabah, berkembang atau tidaknya usaha dapat dilihat dari kelancaran nasabah dalam membayar setiap bulannya.^{16,}

Kemudian, lanjut Muhammad Naufal Ash Shodiqi, monitor dan kontrol BMT La-Tansa mengenai pemberdayaan UMKM tidak hanya sampai di situ tetapi masih dilanjutkan dalam evaluasi yang dilakukan dengan para mitra setiap setahun sekali. Seperti kata beliau: ”untuk

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Hanif Amrullah, *Wawancara*, 11 September 2021.

mengetahui sejauh mana hasil pemberdayaan yang telah dilakukan oleh para mitra disekitar sini, kita setiap setahun sekali mengadakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan nasabah, pembiayaan, dan mengevaluasi masalah yang dihadapi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT memang memiliki peran yang cukup besar dalam memberdayakan UMKM.¹⁷

Selanjutnya wawancara dengan bagian admin BMT La-Tansa Gontor, Salman Alfarisy, beliau menyatakan:

“Dampak yang jelas terjadi pada masyarakat adalah bertambahnya jumlah anggota nasabah kami, khususnya dibidang pembiayaan untuk modal usaha para pelaku UMKM. Selama BMT ini berdiri sudah ada 157 anggota UMKM yang tersebar disekitar wilayah Ponorogo mayoritas anggotanya adalah warga kecamatan Mlarak yang sebesar 84 anggota. Tentunya setiap tahun, anggota kami bertambah, namun pada tahun 2020 hingga sekarang mengalami sedikit penurunan pertumbuhan anggota disebabkan adanya pandemi Covid-19.”¹⁸

Data diatas menunjukkan dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor terbukti berhasil dalam peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk kedepannya seharusnya BMT lebih meningkatkan peran pemberdayaanya sampai ke tahap (*protecting*) perlindungan, agar sesuai dengan teori pemberdayaan yang peneliti gunakan dan tentunya peran pemberdayaan jadi lebih maksimal dan masyarakat atau nasabah juga merasa terlindungi sepenuhnya atas pembiayaan yang dilakukan.

¹⁷ Muhammad Naufal Ash Shodiqi, *Wawancara*, 11 September 2021.

¹⁸ Salman Alfarisy, *Wawancara*, 26 September 2021.

2. Dampak Pemberdayaan Menurut Nasabah

Pernyataan yang telah disampaikan oleh Abidin yang merupakan salah satu anggota nasabah di BMT La-Tansa Gontor merasa sangat terbantu dengan adanya permodalan dari BMT, beliau mengatakan: “dengan adanya BMT disini saya bisa meminjam sejumlah modal yang bisa saya gunakan untuk membuka usaha warung meskipun hanya kecil. Namun dengan itulah saya bisa mendapatkan hasil sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan harian rumah tangga saya¹⁹”

Menurut beliau pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat. Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Misirah, selaku anggota di BMT La-Tansa. Berikut yang beliau sampaikan:

“Saya mengambil pembiayaan di BMT itu karena saya kekurangan modal untuk usaha toko kelontong dan bagi saya BMT La-Tansa itu sangat membantu usaha saya karena dengan persyaratan berupa KTP, Jaminan BPKB dan kartu keluarga saya sudah bisa mengambil pembiayaan di BMT karena BMT itu langsung terjun kemasyarakat. Makanya selain syarat-syarat BMT mempermudah masyarakat BMT juga kalau di mintai untuk membiayai modal kita mereka langsung memberikannya tetapi mereka memberikan pembiayaan itu setelah kami memenuhi syarat yang diajukan BMT

¹⁹Abidin, *Wawancara*, 18 September 2021.

La-Tansa Gontor. Alhamdulillah bantuan modal yang diberikan BMT La-Tansa Gontor sangat membantu usaha saya.²⁰”

Dilanjutkan pernyataan oleh Khoiri, selaku anggota nasabah di BMT La-Tansa Gontor. Berikut yang beliau sampaikan:

“Saya mengambil pembiayaan di BMT La-Tansa karena saya kekurangan modal makanya saya meminjam modal di BMT La-Tansa untuk membuka usaha dan BMT La-Tansa sangat membantu saya untuk membangun usaha saya karna bantuan BMT La-Tansa sehingga sekarang saya sudah bisa lebih banyak membeli ayam. Kalau dulu itu saya hanya bisa membeli bebek hanya sampai 25 ekor dan sekarang Alhamdulillah saya sudah bisa membeli ayam sampai 65 ekor. Makanya saya berterima kasih sekali sama BMT La-Tansa karna sudah sangat membantu usaha saya.²¹”

Pernyataan tersebut jika di interpretasikan bahwa dengan memberikan pembinaan dan modal pendanaan kepada anggota yang telah mengajukan pembiayaan di BMT La-Tansa Gontor dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan oleh BMT La-Tansa Gontor dalam mengembangkan usaha masyarakat, yaitu Misirah dan Khoiri sebelum mengajukan pembiayaan hanya memiliki usaha kecil dan Alhamdulillah berkat bantuan modal dan pembinaan yang diberikan oleh BMT La-Tansa Gontor maka Misirah bisa membangun kembali usahanya lebih maju lagi, begitu pula Khoiri sebelum meminjam modal di BMT La-Tansa Gontor hanya bisa membeli bebek 25 ekor dan setelah meminjam modal di BMT La-Tansa Gontor telah mengembangkan usaha dengan menambah 65 ekor jumlah bebek.

²⁰Misirah, *Wawancara*, 18 September 2021.

²¹Khoiri, *Wawancara*, 18 September 2021.

Selanjutnya wawancara dengan Khomsatun, salah satu nasabah yang mempunyai toko sembako mengaku bertambahnya omset bulanan yang sebelumnya hanya 5 juta perbulan sekarang 7,5 juta perbulan karena tambahan modal dan pembinaan dari BMT La-Tansa Gontor:

“saya sudah kurang lebih 1 tahun menjadi nasabah BMT La-Tansa, selama ini BMT memang sangat berperan dalam pertumbuhan usaha sembako ini, selain mendapat modal dari BMT, BMT juga memberikan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap bisnis usaha para nasabah. Sebelum mengambil pembiayaan dari BMT pendapatan omset saya dalam satu bulan kurang lebih 5 juta, alhamdulillah setelah mengambil pembiayaan dan dengan adanya pembinaan keuangan dari BMT, omset saya perbulan bertumbuh mencapai 7,5 juta”²²

Peran pemberdayaan BMT diatas membuktikan bahwa keberadaan BMT memang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya para anggota nasabah. Bertumbuhnya ekonomi masyarakat berarti menjadi indikator keberhasilan peran hadirnya BMT La-Tansa dalam hal pemberdayaan UMKM.

C. Hasil Analisis Data

1. Proses Pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor Terhadap UMKM

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teorinya Fahrudin dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat”. Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya diantaranya;

²²Khomsatun, *Wawancara*, 25 September 2021.

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Dalam hal peran BMT La-Tansa Gontor telah memenuhi ketentuan dalam upaya pemberdayaan. Terbukti dari usaha pemupukan modal yang berasal dari anggota. BMT La-Tansa Gontor melaksanakan penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil modal. Dalam sistem bagi hasil modal yang diberikan adalah sebagai amanah yang harus dijaga dan ini sebagai bukti penerapan tanggung jawab para nasabah terhadap BMT. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT La-Tansa Gontor mempunyai beberapa peranan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, diantaranya melakukan permodalan dan pendampingan usaha.

BMT La-Tansa Gontor sangat berperan penting dalam ekonomi anggota dan mampu memiliki peran dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi kerakyatan, sehingga pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri. Berbagai program dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui BMT, bukan hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota, lebih dari itu, karya nyata koperasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan

pencapaian berbagai program pemerintah, dengan demikian semakin memperkuat eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, mengenai teori dan fakta di lapangan, BMT La-Tansa Gontor menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro dengan cukup baik misalnya dengan melakukan permodalan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabahnya. Disisi lain ada beberapa nasabah yang mengaku kurang mendapatkan pembinaan secara maksimal dikarenakan hanya mendapatkan pembinaan diawal pembiayaan, berarti secara teori BMT sudah menjalankan tugasnya dalam upaya pemberdayaan, akan tetapi masih kurang maksimal. Maka dari itu BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya selalu melakukan pembinaan dan pengawasan setiap bulannya.

- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan,

BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

BMT La-Tansa Gontor dalam memberikan modal pembiayaan kepada para anggota yaitu dengan melihat bahwa anggota tersebut telah dianggap produktif dan konsekuen serta bertanggungjawab terhadap usahanya, karena dengan memberikan modal pembiayaan adalah faktor produksi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan aset lain. Dalam hal ini BMT La-Tansa Gontor memberikan pembiayaan dengan syarat-syarat yang sesuai sebelum memberikan pembiayaan, pihak BMT mengadakan *survey* (terjun langsung) ke tempat pemohon untuk memastikan keberadaan dari usaha pemohon. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah penerapan modal pembiayaan terhadap pemohon karena dalam suatu usaha produktif yang diberi modal pembiayaan agar bisa berkembang.

Sebagai persyaratan pemberian pembiayaan, antara anggota dengan BMT La-Tansa Gontor mengadakan perjanjian secara tertulis mengenai bentuk pembiayaan sistem bagi hasil. Setelah kesepakatan tercapai maka anggota harus melampirkan beberapa berkas yang digunakan untuk syarat administrasi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, tentang fakta dilapangan bahwasanya BMT La-Tansa Gontor telah sesuai dengan teori pemberdayaan (*empowering*) yaitu melakukan upaya pemberdayaan

berupa pelatihan dan pengawasan bisnis terhadap mitra yang bergabung, hal ini menunjukkan bahwa peran BMT dalam pemberdayaan UMKM sudah sesuai teori yang ada. Dengan catatan bahwasanya pihak BMT hanya melakukan pelatihan dan pengawasan hanya pada masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk bergabung menjadi nasabah.

- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor belum sesuai teori. Dalam hal perlindungan BMT La-Tansa Gontor masih belum kuat. Adapun peran BMT dalam pemberdayaan usaha masyarakat kecil dan menengah masih kurang karena hanya fokus pada pemberian pembiayaan dan pembinaan saja, itupun kurang maksimal. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh BMT hanya fokus pada pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, *musyawamah*, dan lain-lain. Sehingga BMT membantu para usaha kecil menengah hanya dengan membantu lewat sektor komersil saja. Selain itu kendala yang masih menjadi halangan BMT dalam perannya untuk usaha mikro yaitu masih sering terjadi kesulitan anggota dalam menerapkan pembukuan, sehingga para usaha mikro masih kurang efektif dalam melaksanakan usahanya tersebut. Selain itu pemberdayaan

yang dilakukan BMT belum sepenuhnya untuk mensejahterakan anggota karena pemberdayaan hanya sebatas pembiayaan saja belum sampai pada tahap (*protecting*) perlindungan, yaitu melindungi anggotanya apabila terjadi pembiayaan yang macet. Seharusnya BMT dapat memberdayakan masyarakat dengan tahap (*protecting*), karena BMT La-Tansa Gontor sudah termasuk lembaga keuangan syariah yang sudah cukup lama berdiri, sehingga seharusnya dapat membina dan melindungi anggotanya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Dampak Pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor Terhadap UMKM

Peranan BMT sebagai keuangan mikro tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan atau kredit. Bahkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan, selam dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet.

Dari hasil program-program sasaran yang dilaksanakan BMT La-Tansa Gontor dalam rangka mensejahterakan anggotanya terlihat dari hasil analisis bahwa dengan adanya BMT La-Tansa Gontor ini dari para usaha

kecil, pedagang kecil di sekitar mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan program-program tersebut anggotanya merasa terbantu. Berarti dapat dikatakan peranan BMT La-Tansa Gontor untuk mencapai kesejahteraan anggotanya dampaknya mengalami kesejahteraan.

BMT La-Tansa Gontor cukup berperan penting dalam ekonomi anggota dan mampu memiliki peran dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri. Berbagai program dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui BMT, bukan hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota, lebih dari itu, karya nyata koperasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pencapaian berbagai program pemerintah, dengan demikian semakin memperkuat eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mensejahterakan para usaha kecil yang menjadi anggota BMT La-Tansa Gontor, maka BMT La-Tansa Gontor selalu memberi kemudahan bagi anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhannya baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kemudahan untuk anggota itu terwujud dengan adanya pelayanan yang baik dari segenap karyawan dalam melayani anggota dalam semua bidang usaha, selain itu dengan adanya peran BMT La-Tansa Gontor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, lebih khusus bagi para usaha kecil maka dengan asumsi bahwa unit usaha yang beranekaragam akan memberikan

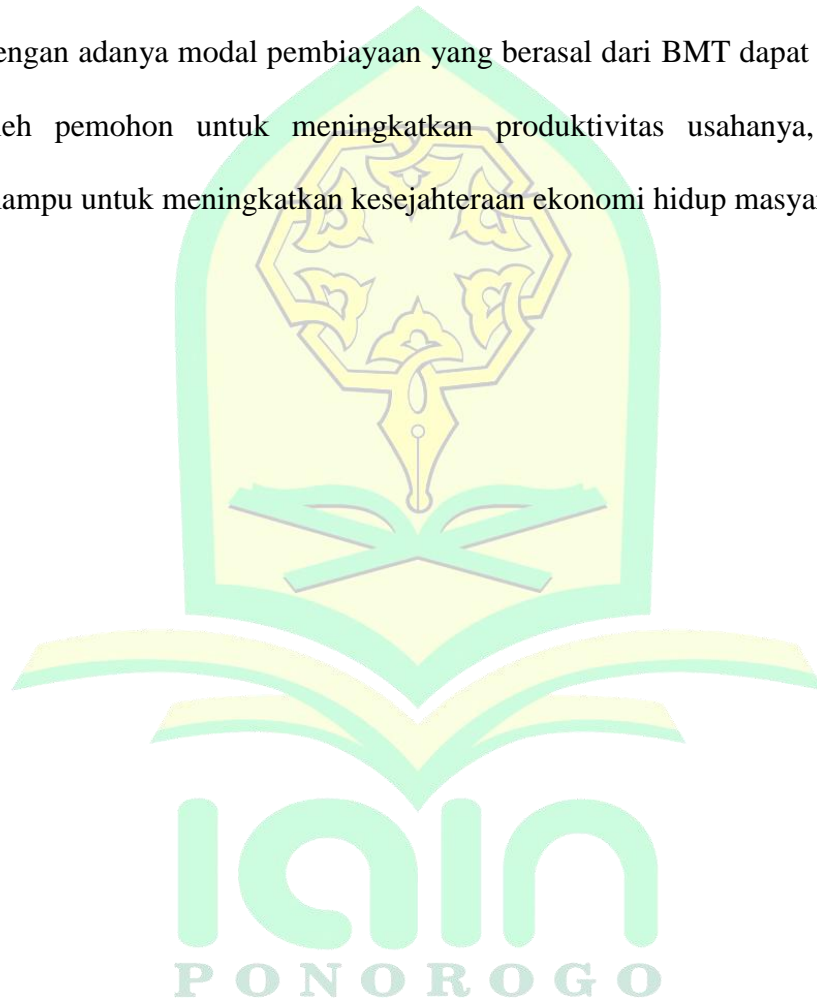
kemudahan bagi para usaha kecil dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan akan tercapai.

Sedangkan untuk mengukur kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya seperti pemberian pembiayaan dan barang-barang kebutuhan anggota. Dapat juga dilihat dari tingkat pendapatan para usaha kecil yang semakin mengalami kenaikan setelah masuk menjadi anggota BMT La-Tansa Gontor. Sesuai dengan indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, maka disini para usaha kecil dapat dikatakan sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi apabila mempunyai tingkat pendapatan yang berada diatas rata-rata atau dalam artian selama ini pendapatan yang diperoleh telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran BMT dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil untuk masyarakat yaitu BMT memberikan pembinaan kepada masyarakat terlebih khusus kepada anggota yang mempunyai usaha serta jika anggota kekurangan modal bisa melakukan pembiayaan lagi dan BMT siap membantu. Selain itu juga memberikan pembinaan untuk masyarakat untuk menabung di BMT dengan tujuan agar uang mereka bisa terkumpul dan uang tersebut dapat digunakan untuk mengangsur pembiayaan. Untuk pengawasan sendiri pihak BMT juga

memantau usaha yang dijalankan anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut berjalan untung atau rugi dilihat dari perhitungan laba tiap bulannya.

Keberadaan BMT La-Tansa Gontor ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat khususnya anggota nasabah, antara lain dengan adanya modal pembiayaan yang berasal dari BMT dapat digunakan oleh pemohon untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi hidup masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor terhadap UMKM

Berdasarkan teori pemberdayaan yang digunakan peneliti, BMT La-Tansa Gontor berada dalam tahap *empowering* (memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) La-Tansa Gontor menjalankan perannya dalam memberdayakan UMKM melalui pemberdayaan dengan bantuan modal berupa penyaluran pembiayaan dan melalui pendampingan berupa kontrol dan monitoring terhadap usaha nasabah serta pendampingan manajerial seperti manajemen keuangan (pembukuan).

2. Dampak pemberdayaan BMT La-Tansa Gontor terhadap UMKM

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT La-Tansa Gontor membuahkan hasil yang positif. Secara keseluruhan responden nasabah pembiayaan UMKM BMT La-Tansa Gontor mengalami peningkatan dan kemajuan dalam usaha mereka, baik dari segi laba/pendapatan usaha, perkembangan usaha dan manajerial usaha, juga bertambahnya pelaku UMKM setiap tahunnya yang melakukan pembiayaan di BMT La-Tansa Gontor.

B. SARAN

1. Bagi pihak BMT La-Tansa Gontor

Seharusnya BMT La-Tansa Gontor dapat memaksimalkan perannya dalam pemberdayaan UMKM sampai ke tahap *protecting* yaitu melindungi anggotanya apabila terjadi pembiayaan yang macet, mengingat BMT ini sudah lama berdiri dan kurang lebih hampir 12 tahun beroperasi. Menurut Djumhana salah satu solusinya adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Solusi selanjutnya yaitu dengan merekrut karyawan tetap, karena melihat kelemahan yang terjadi di BMT La-Tansa Gontor selama ini, pada bergantinya staf karyawan setiap tahunnya yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam memonitoring para anggota nasabahnya.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai peran BMT dalam pemberdayaan UMKM dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguanita. *Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa'adah Malang*. Skripsi: FT-UIN Malang, 2019.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Andayani, Indah. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 1 (Maret 2021), 14-21.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI, diakses 20 Februari 2021.
- Bariadi, Lili, dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005.
- Beni, Sekretaris BMT La-Tansa Gontor. *Wawancara*, pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Fahrudin. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2012.
- H. A. Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hestanto. Baitul Mal Wattamwil dan BBPR, <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2006.
- Ismawan, Indra. *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*. Jakarta: Gramedia, 2001.

- Kara, Muslimin. “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mitra, Kecil, dan Menengah”, *Jurnal Ahkam*, 2 (Juli 2018), 15-24.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- MA Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan*, terjemahan Drs. M. Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mardikanto. *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Materi Ke BMT-an, Sumber. Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES.
- Maulana, Ikhsan. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://www.forumzakat.net/index.php>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
- Muhammad Iqbal. “Karakteristik UMKM, <http://e-journal.uajy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 1999.
- Muslimin, Supriadi. “Raih Dukungan Bank Syariah, <http://www.seputar-indonesia.com>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Najiati. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambu*. Bogor: Wetlands International, 2005.
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2001.
- Peraturan Dasaran dan Contoh AD-ART BMT. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), *Pendidikan dan Pelatihan Baitul maal wat Tamwil*.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Rohman, Penjual Sembako. *Wawancara*, pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Sarwoko, Endi. “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.” *Jurnal Modernisasi*, 3, (Oktober 2016), 11-22.
- Siregar, Sayful Hasbi. “Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah” <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sunariani, Ni Nyoman “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 1, (2017), 9-17.
- Showam Azmy, Muhammad. “Bank Syariah: Bank Yang Ramah UMKM” <http://ekisonline.com/index>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Widodo, Hertanto. Dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan, 2000.